

DAMPAK AKUNTANSI NILAI WAJAR TERHADAP PEREKONOMIAN BANGSA

Elizabeth Sugiarto Dermawan

Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: eliz@tarumanagara.ac.id

Abstract: The fair value is expected to provide more relevant information to users. On the other hand, there are many controversial issues related to the application of fair value had been blamed for the global financial crisis. It is a trigger regulatory bodies to continue to monitor and evaluate the benefits of fair value in order not to create a conflict of interest between users of financial statements, which in turn could hurt the nation's economy.

Keywords: fair value, relevance, nation's economy, conflict of interest.

Abstrak: Nilai wajar diharapkan memberikan informasi yang lebih relevan bagi pengguna. Di sisi lain, terdapat berbagai isu kontroversial terkait dengan penerapan nilai wajar hingga sempat dituding sebagai penyebab krisis keuangan global. Hal ini menjadi pemicu badan-badan pengatur untuk terus memonitor dan mengevaluasi manfaat nilai wajar agar tidak menimbulkan konflik kepentingan antar pengguna laporan keuangan yang pada akhirnya dapat merugikan perekonomian bangsa.

Kata kunci: Nilai wajar, relevansi, ekonomi bangsa, konflik kepentingan.

PENDAHULUAN

Masalah pengukuran seharusnya sudah menjadi perhatian pengguna informasi keuangan dalam berbagai keputusan karena memberikan makna semantik yang dapat memberikan gambaran lebih baik terhadap sesuatu yang diukur. Campbell dalam Godfrey *et al* (2010: 134) mengemukakan bahwa pengukuran didefinisikan sebagai: “*the assignment of numerals to represent properties of material systems other than numbers, in virtue of the laws governing these properties.*” Sementara Stevens dalam Godfrey *et al* (2010:134) mengemukakan bahwa pengukuran adalah “*assignment of numerals to objects or events according to rules.*” Ketika suatu aturan semantik memberikan angka-angka pada obyek atau kejadian akan dikaitkan dengan hubungan matematis dalam suatu skala ukuran yang dapat memberikan makna (arti). Godfrey *et al* (2010:140) mengemukakan bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan dengan beberapa sumber kesalahan antara lain:

- (1) *Measurement operations stated imprecisely; For example, the calculation of profit involves numerous operations, such as cost classifications and allocations between assets and expenses which are often interpreted differently by different accountants.*
- (2) *Measurer; One concern in accounting is that managers have certain biases to increase the recorded profit or asset base and then place pressure on the accountant to bias the accounts.*

- (3) *Instrument*; There is potential for error even when the instrument is not a physical tool but is, for example a chart, graph, table of numbers or price index.
- (4) *Environment*; For example, weather conditions may affect the instrument or the measurer, such as noise may distract the measurer, or in accounting, pressure from management may affect the accountant's decisions, or another factor such as the manager may be paid his or her bonus according to the amount of profit earned or the cost of debt funds may be determined by the amount of gearing (assets/equity).
- (5) *Attribute unclear*; For example, what is the value of a non-current asset? Is it the present value, acquisition cost, current cost, or selling price? Is it value in use, value in exchange, or some other attribute that the accountant should measure?
- (6) *Risk and uncertainty*; Risk exists because the amount of returns is unknown, an uncertainty means that we face a relatively unknown distribution of returns. This is usually caused by highly uncertain returns from intangible investment (e.g. human capital, research and development, and marketing) and returns from these investments that vary greatly across firms and industries.

Jika seluruh pengukuran mengandung kesalahan, maka yang dibutuhkan adalah membuat batasan kesalahan yang dapat diterima sebagai nilai yang dianggap 'benar' dan wajar menurut akuntansi. Kartikahadi *et al* (2012:63-65) mengemukakan bahwa unsur-unsur yang dilaporkan dalam laporan keuangan dapat diukur dengan menggunakan beberapa dasar pengukuran, yaitu: biaya historis (*historical cost*), biaya kini (*current cost / current entry price*), nilai realisasi / penyelesaian (*realizable / settlement value / current exit price*), nilai sekarang (*present value*), dan nilai wajar (*fair value*).

Selama bertahun-tahun pencatatan nilai dalam informasi keuangan didominasi oleh *historical cost* karena penekanannya pada pertanggungjawaban, namun seiring dengan bermunculannya krisis yang menyebabkan ketidakstabilan perekonomian di berbagai negara, penggunaan *historical cost* kehilangan relevansinya untuk pengambilan keputusan ekonomi. Wolk *et al* (2004) dalam Sonbay (2010:2-3) mengemukakan bahwa dalam kondisi inflasi, sistem akuntansi *historical cost* menimbulkan dua masalah dasar, yaitu: (1) ketidakrelevanan laporan keuangan karena harga mengalami perubahan sehingga menjadi masalah *representational faithfulness* dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan, (2) masalah penjumlahan angka historis dalam laporan keuangan menunjukkan pengeluaran dolar pada titik waktu yang berbeda sehingga melekatkan jumlah daya beli yang berbeda.

Godfrey *et al* (2010:147) mengemukakan bahwa "*a number of academic accounting papers that suggested the value relevance of conventional profit had significantly declined over time, but balance sheet and intangible assets had become more important.*" Di sisi lain, Hepiprayudi (2009a) mengemukakan bahwa dengan kondisi pasar yang makin dinamis dan berkembang sangat pesat, akhirnya konsep *historical cost* tidak cocok lagi karena tidak mencerminkan nilai pasar dan digantikan dengan konsep *fair value*.

Pengertian Nilai Wajar. ACCA F7 (2011:15-16) mengemukakan bahwa *International Financial Reporting Standar (IFRS)* memuat kerangka kerja konseptual yang menyatakan bahwa:

Most importantly, financial statement should present fairly the financial position, financial performance and cash flow of an entity.

There may be (very rare) circumstances when management decides that compliance with a requirement of an IFRS would be misleading. Departure of IFRS is therefore required to achieve a fair presentation. The following should be disclosed in such an event.

(a) Management confirmation that the financial statements fairly present the entity's financial position, performance and cash flows.

(b) Statement that all IFRS have been complied with except departure from one IFRS to achieve a fair presentation.

(c) Details of the nature of the departure, why the IFRS treatment would be misleading, and the treatment adopted.

(d) Financial impact of the departure.

This is usually referred to as the 'true and fair override'.

Mirza dan Holt (2011:302) mengemukakan bahwa nilai wajar (*fair value*) adalah:

The amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, willing parties in an arm's-length transaction. In other words, fair value is an actual or estimated transaction price on the reporting date for a transaction taking place between unrelated parties that have adequate information about the asset or liability being measured.

Pengertian *Fair Value* menurut IFRS dalam ACCA F7 (2011 : 73, 77, 117, 161, 197, 251):
“*The price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.*”

Jusuf Wibisana dalam Hepiprayudi (2009a) mengemukakan bahwa dibandingkan dengan *historical cost*, *fair value* memiliki tiga keunggulan, yaitu: (1) laporan keuangan menjadi lebih relevan untuk pengambilan keputusan, (2) meningkatkan keterbandingan laporan keuangan, dan (3) informasi yang dihasilkan lebih dekat dengan apa yang diinginkan oleh pemakai laporan keuangan.

Swardjono (2004) dalam Sonbay (2010:5) mengemukakan bahwa dalam SFAC no.7 paragraf 23 mengenai *fair value* menjadi sasaran pengukuran dengan nilai sekarang karena pengukuran *fair value* menangkap secara penuh kelima unsur, yaitu: (1) suatu estimat aliran kas masa datang atau, dalam beberapa kasus yang kompleks, serangkaian aliran kas masa datang yang tiba pada saat berbeda, (2) harapan-harapan tentang variasi yang mungkin terjadi dalam jumlah dan saat tibanya aliran kas tersebut, (3) nilai waktu uang yang ditunjukkan dengan oleh bunga bebas risiko, (4) harga atau nilai penanggungan risiko atau ketidakpastian yang melekat pada aset atau kewajiban, (5) faktor-faktor lain termasuk likuiditas dan ketidaksempurnaan pasar.

Dengan demikian perlu dipahami bahwa kehandalan pengukuran nilai wajar bergantung pada masukan-masukan dalam proses pengukurannya.

Hitz (2007) dalam Sonbay (2010:6) mengungkapkan bahwa terdapat tiga hirarki dalam mengestimasi *fair value*, yaitu dengan: (1) nilai pasar, (2) komparasi dengan harga pasar dari item yang dapat diperbandingkan dengan item yang dinilai, (3) dengan menggunakan estimasi. Tidak seluruh *fair value* dapat diukur dengan *current market value*. Jika berasal dari transaksi wajar (*arm's length*) dan harga pasarnya dapat dengan mudah ditentukan, maka *fair value* dapat diukur dengan *current market value*, pengukuran

ini disebut juga dengan *mark to market*. Jika item-item yang ditransaksikan tidak memiliki harga pasar, *fair value* diukur dengan menggunakan model penilaian yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan dan estimasi tertentu, pengukuran ini disebut juga dengan *mark to model*. Oleh karena itu, Blommaert dalam Verhog (2003) dalam Sonbay (2010:6) menyimpulkan bahwa pengukuran *fair value* memiliki implikasi subyektif.

Terdapat beberapa isu dalam penerapan nilai wajar, antara lain:

- (1) Apabila Nilai Pasar aset saat ini untuk penggunaan alternatifnya melampaui Nilai Pasar untuk penggunaan yang ada, terdapat perbedaan mengenai pengungkapan dari fakta ini, apakah harus dicatatkan di dalam neraca atau cukup dimuat di dalam catatan penjelasan.
- (2) Dalam penilaian properti khusus yang tidak memiliki pasar, semula digunakan dasar penilaian Biaya Pengganti Terdepresiasi (*Depreciated Replacement Cost*) yang kemudian digantikan oleh *Value in Used*.
- (3) Apabila aset dalam suatu kelompok aset (*asset class*) direvaluasi, maka seluruh aset dalam kelompok aset tersebut harus direvaluasi dan harus selalu di-*update* berdasarkan Nilai Saat Ini pada setiap tanggal pelaporan keuangan.
- (4) Apabila model revaluasi diadopsi, tidak dimungkinkan adanya opsi untuk kembali kepada model biaya di masa depan.
- (5) Persyaratan mengenai pengungkapan tambahan dalam model biaya, dalam hal Biaya Historikal berbeda secara signifikan dengan Nilai Saat Ini.
www.zeinyusufofficial.wordpress.com

Tabel 1. Factors That Affect Fair Market Value

<i>If the factor you are considering is</i>	<i>Then you should ask these question ...</i>
...	
<i>Cost or Selling Price</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Was the purchase or sale of property reasonably close to the date of contribution?</i> 2. <i>Was any increase or decrease in value, as compared to your cost, at a reasonable rate?</i> 3. <i>Do the terms of purchase or sale limit what can be done with the property?</i> 4. <i>Was there an arm's-length offer to buy the property close to the valuation date?</i>
<i>Sales of Comparable Properties</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>How similar is the property sold to the property donated?</i> 2. <i>How close is the date of sale to the valuation date?</i> 3. <i>Was the sale at arm's length?</i> 4. <i>What was the condition at the market at the time of sale?</i>
<i>Replacement Cost</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>What would it cost to replace the donated property?</i> 2. <i>Is there a reasonable relationship between replacement cost and fair market value?</i> 3. <i>Is the supply of donated property more or less than the demand for it?</i>
<i>Opinions of Experts</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Is the expert knowledgeable and competent?</i> 2. <i>Is the opinion thorough and supported by facts and experiences?</i>

Sumber: www.irs.gov

Tidak ada satu formula tunggal yang selalu dapat diterapkan dalam menentukan nilai suatu properti. Fakta dan keadaan yang terkait dengan properti seperti *desirability*, *use*, dan *scarcity* menjadi pertimbangan dalam menilai aset. Tabel 1 memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai pasar wajar dari *donated property*.

Dalam ACCA F7 (2011: 78) terkait dengan *fair value model* untuk *investment property* ada tiga hal penting, yaitu:

- (1) *After initial recognition, an entity that chooses the fair value model should measure all of its investment property at fair value, except in the extremely rare cases where this cannot be measured reliably. In such cases it should apply the IAS 16 cost model.*
- (2) *A gain or loss arising from a change in the fair value of an investment property should be recognised in net profit or loss for the period in which it arises.*
- (3) *The fair value of investment property should reflect market conditions at the end of the reporting period.*

Fair value model dalam *investment property (non-financial assets)* tidak sama dengan revaluasi yang peningkatan nilai melekatnya diakui dalam surplus revaluasi sementara dalam *fair value model* perubahan nilai wajar diakui dalam *profit or loss*. Dalam ACCA F7 (2011: 78-79) juga dikemukakan bahwa:

The standard elaborates on issues relating to fair value.

- (a) *Fair values assumes that an orderly transaction has taken place between market participants, ie both buyer and seller are reasonably informed about the nature and characteristics of the investment property.*
- (b) *A buyer participating in an orderly transaction is **motivated but not compelled** to buy. A seller participating in an orderly transaction is neither an over-eager nor a forced seller, nor one prepared to sell at any price or to hold out for a price not considered reasonable in the current market.*
- (c) ***Fair value is not the same as 'value in use'** as define in IAS 36 Impairment of assets. Value in use reflects factors and knowledge specific to the entity, while fair value reflects factors and knowlege relevant to the market.*
- (d) *In determing fair value an entity **should not double count assets**. For example, elevators or air conditioning are often an integral part of a building and should be included in the investment property, rather than recognised separately.*
- (e) *In those rare cases where an **entity cannot determine the fair value of an investment property reliably**, the cost model in **IAS 16** must be applied until the investment property is disposed of. The **residual value must be assumed to be zero**.*

Nilai Wajar dan Permasalahannya. King (2009) mengemukakan bahwa "*fair value financial reporting is being blamed for the subprime meltdown, bank failures, the credit crunch, and the current recession.*" Tuduhan bahwa penerapan akuntansi nilai wajar yang menyebabkan krisis keuangan global disebabkan karena efek *procyclical* dalam pasar

finansial yang memperparah krisis karena mengakibatkan nilai aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar akan terus menurun karena kondisi pasar yang buruk yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor, dan pada akhirnya nilai pasar yang terus menurun tersebut tidak dapat mencerminkan nilai wajar. www.lockedmeyan.wordpress.com.

Anis Baridwan dalam Sonbay (2010:3) mengungkapkan bahwa ketika terjadi krisis keuangan 2008 di Amerika Serikat yang dipicu oleh *subprime mortgage*, *fair value* sempat dijadikan kambing hitam, bahkan membuat SEC, negara-negara G-20, dan IMF melakukan kajian. Kesimpulan kajiannya sama-sama menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang dapat menunjukkan *fair value* menjadi biang krisis, karena penyebab krisis tersebut adalah adanya pengambilan risiko yang terlalu besar. Hasil studi SEC menyebutkan bahwa krisis bukan disebabkan *fair value*, melainkan oleh kegagalan perbankan atau lembaga-lembaga keuangan di Amerika Serikat karena *probable credit losses*, keraguan atas kualitas aset, dan turunnya kepercayaan kreditor maupun investor. Disimpulkan bahwa penyebab krisis keuangan global adalah kesalahan pengelolaan, dan semua pihak termasuk IMF sepakat untuk meneruskan konsep *fair value* hanya memang memerlukan perbaikan di sana-sini.

Godfrey *et al* (2010) mengemukakan bahwa usaha menggantikan *historical cost* dengan *current cost* sudah pernah dilakukan baik di Amerika, Inggris, maupun Australia namun ditinggalkan dengan rincian sebagai berikut:

- *Current cost in the United States*
 - *an experiment but abandoned (1976 -1984)*
- *Current cost in the United Kingdom*
 - *implemented but abandoned (1975 – 1985)*
- *Current cost in Australia*
 - *recommended but abandoned (1976 – 1980's)*

Hal senada juga dikemukakan Ning *et al* (2010) bahwa akuntansi nilai wajar bukan hal baru dalam *US GAAP* dan menyimpulkan bahwa seharusnya tidak dihentikan dalam segala kondisi.

Jusuf Wibisana dalam Hepiprayudi (2009a) mengemukakan bahwa permasalahan dalam penentuan nilai wajar antara lain (1) apabila tidak terdapat pasar yang aktif mentransaksikan akun yang bersangkutan maka nilai wajar sulit ditentukan, (2) keberadaan *willing sellers* dan *willing buyers* kadang tidak cukup untuk menjustifikasi apakah suatu pasar terbilang aktif, (3) harga yang terbentuk dalam *forced transaction*, *forced liquidation*, atau *distressed sales* mungkin tidak mencerminkan nilai wajar yang sebenarnya.

Di sisi lain, yang harus diperhatikan bahwa profesi akuntan sebenarnya hanya pencatat nilai sementara yang menciptakan nilai adalah *marketer*. Perner (1999-2008) mengemukakan bahwa “*value can be created in a number of different ways and it should be noted that value must be examined from the point of view of the customer.*” Ditambahkan bahwa beberapa bentuk penciptaan nilai bagi pelanggan antara lain melalui (1) *form utility*, (2) *place utility*, (3) *time utility*, dan (4) *possession utility*. *Form utility* mencakup ide bahwa produk dibuat tersedia bagi pelanggan dalam beberapa bentuk yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan berbagai bentuk bahan baku yang digunakan untuk membuat produk tersebut. *Place utility* mengacu pada ide bahwa suatu produk dibuat tersedia bagi pelanggan di lokasi yang lebih dikehendaki akan lebih bernilai dibandingkan

di lokasi tempat barang tersebut diproduksi. *Time utility* mencakup ide bahwa produk dibuat tersedia bagi pelanggan saat dibutuhkan. *Possession utility* mencakup ide bahwa konsumen dapat pergi ke suatu tempat dan memperoleh berbagai macam barang dalam jumlah besar dari pabrikan yang berbeda dalam satu kali belanja. Bentuk-bentuk penciptaan nilai ini dapat menjadikan perhitungan nilai wajar menjadi sangat subjektif.

Tim Krumwiede (2008) dalam Sonbay (2010:7) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kritik penting terhadap *fair value*, yaitu: (1) perkiraan manajemen tentang *fair value* dapat meleset karena asumsi yang salah, dan (2) opportunistik dan ketidakjujuran manajemen dapat mengambil keuntungan dari penilaian dan estimasi yang digunakan. Terdapat beberapa hal krusial yang harus segera dicarikan solusinya dalam penerapan *fair value* di Indonesia:

- (1) Masalah perpajakan yang kurang kondusif terhadap penerapan nilai wajar. Mengacu pada pasal 5 PMK no 79 tahun 2008 yang menyatakan pengenaan PPh final sebesar 10% atas selisih lebih penilaian kembali aset, maka harus dibayar pada tahun tersebut (tidak boleh dicicil dalam 5 tahun misalnya) dan tidak menghasilkan hutang pajak tangguhan yang bisa dibalik di tahun berikutnya bila nilai aktiva turun. Apabila model revaluasi digunakan dan jika setiap tahun harga asetnya meningkat maka harus membayar pajak final padahal kenaikan aset tersebut tidak membawa aliran kas masuk ke dalam perusahaan, sehingga model revaluasi kurang mendapat dukungan perusahaan.
- (2) Masalah penilaian atau *appraisal*. Standar Penilaian Indonesia (SPI) yang merujuk pada *International Valuation Standards (IVS)* harus memberikan pedoman mengenai penerapan Nilai Wajar sesuai dengan IFRS dan SAK yang akan terus diharmonisasikan (saat ini dikonvergensi) dari waktu ke waktu. Penilai harus selalu berkomunikasi dengan auditor dalam penggunaan dasar penilaian dan metodologi yang sesuai sehingga auditor mendapatkan gambaran yang memadai mengenai pengukuran Nilai Wajar dan pengungkapan yang dibutuhkan di dalam laporan keuangan untuk menghindari timbulnya pemahaman yang menyesatkan. www.zeinyusufofficial.wordpress.com

Solusi untuk Agency Problem. Laporan keuangan dapat menjadi informasi bagi berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda, oleh karena itu dalam penerapan akuntansi nilai wajar harus dijaga agar tidak timbul *conflict of interest* yang ujungnya merugikan semua pihak. Briiloff dalam Surbecti (2010) mengemukakan bahwa dunia akuntansi cenderung melibatkan trik-trik fokus yang dapat menyesatkan pembaca laporan keuangan, hingga disarankan bahwa terkait dengan *merger* agar para ahli *restructuring merger* tidak menekan entitas yang modalnya kecil karena dapat merugikan rakyat banyak.

Hepiprayudi (2009b) mengungkapkan bahwa *agency problem* adalah masalah jarak antara *principle* dan *agent* yang dalam relasi membutuhkan jembatan antara pemilik dan buruh atau pekerja yang disebut *agency relation*, yaitu informasi. Biaya yang dikeluarkan untuk menjaga hubungan baik antara *principles* dan *agent* disebut *agency cost*.

Siahaan (2012) mengemukakan tiga masalah utama yang menjadi kontroversi dalam pembuatan laporan keuangan yaitu: *relevance*, *reliability*, dan *volatility*. Relevansi merupakan karakteristik kualitatif yang lebih condong digunakan untuk pengambilan keputusan sehingga laporan keuangan harus dapat mengukur perubahan nilai riil yang terjadi. Reliabilitas merupakan karakteristik kualitatif yang lebih condong untuk pertanggungjawaban sehingga membutuhkan penilaian yang dapat dipercaya. Volatilitas

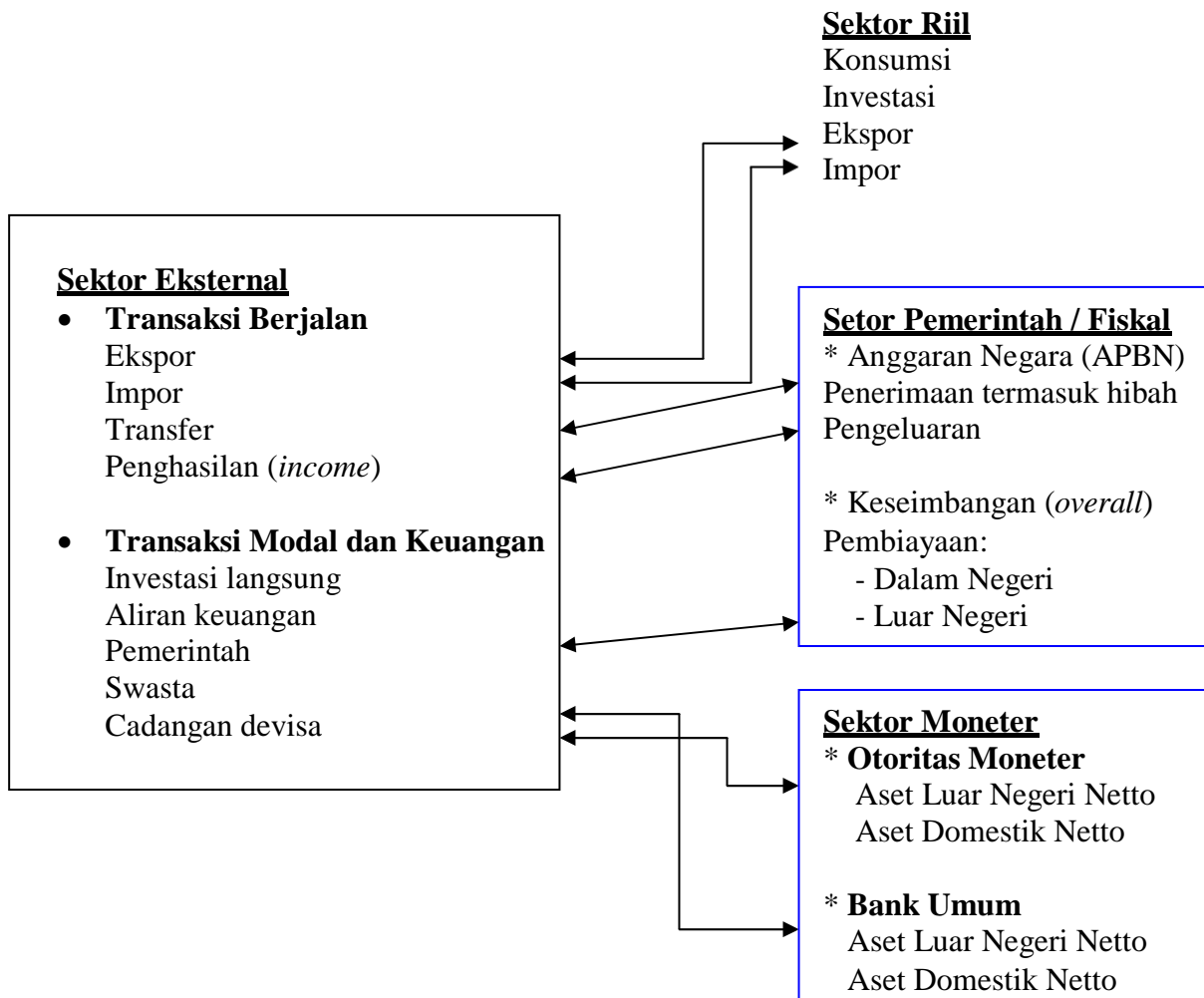
yang besar atas nilai aset dan liabilitas akan tercermin dari entitas yang kurang efektif dalam mengelola risiko. Para investor dan kreditor akan memiliki informasi yang lebih berguna dan relevan dalam membedakan risiko antar perusahaan ketika membuat keputusan investasi dan keputusan pemberian kredit jika menggunakan *fair value accounting*.

Walaupun terdapat *trade-off* antara *reliability* dan *relevance*, namun *trend* masa depan akan makin condong menggunakan *fair value*. Terdapat beberapa alasan untuk penerapan *Fair Value Accounting*, yaitu: (1) keinginan *Securities Exchange Commission (SEC)* untuk meningkatkan transparansi informasi mengenai investasi, (2) komparabilitas terhadap perusahaan asing yang terdaftar di Bursa Amerika, (3) Uni Eropa mensyaratkan penggunaan standar internasional yang menerpakan akuntansi nilai kini (*present value accounting*), (4) kebutuhan pasar modal dan pengguna lain dari laporan keuangan untuk pengukuran nilai yang lebih akurat dan realistis. www.zeinyusufofficial.wordpress.com

Dampak Nilai Wajar terhadap Perekonomian. Kartikahadi *et al* (2012: 1) mengemukakan bahwa manusia harus pandai mengelola dan memanfaatkan sumber ekonomi yang terbatas secara efisien dan efektif, dimana akuntansi digunakan sebagai metode perhitungan dan pelaporan sumber ekonomi tersebut. Kartikahadi *et al* (2012:10) menambahkan bahwa peran akuntansi (baik akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, maupun akuntansi pajak) sangat penting dalam pengalokasian sumber ekonomi. Akuntansi manajemen berperan membantu manajemen dalam mengelola faktor produksi secara efektif dan efisien, serta sangat penting dalam persaingan di pasar barang dan jasa. Akuntansi keuangan berperan membantu manajemen dalam pencarian dana baik dari pasar uang maupun pasar modal sehingga penyajian laporan keuangan harus akurat, dapat diandalkan, transparan dan tidak menyesatkan agar tercipta pasar uang dan para modal yang efisien. Dengan demikian, publik (calon investor dan kreditor) dapat mempercayai laporan keuangan untuk dijadikan dasar keputusannya. Akuntansi pajak diperlukan untuk penyaluran dana dari dan untuk masyarakat melalui kas negara sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku secara adil dan tertib. Kartikahadi *et al* (2012:10) juga mengemukakan bahwa:

Kumpulan informasi keuangan sektor mikro akan membentuk informasi sektor makro yang mampu menghitung dan melaporkan indikator ekonomi secara andal, dan akhirnya kembali mampu memberikan masukan bagi para pelaku dalam sektor riil atau mikro. Demikianlah sirkulasi akuntansi sebagai suatu sistem informasi keuangan di sektor mikro dan makro yang saling terkait dalam mendorong meningkatkan kemakmuran suatu masyarakat ekonomi.

Bank Indonesia dalam Kartikahadi (2012:11) menyajikan gambaran hubungan kegiatan ekonomi antar berbagai sektor untuk lebih memahami pentingnya informasi keuangan mikro terhadap sektor makro (lihat Gambar 1 di bawah).



Gambar 1. Hubungan Kegiatan Ekonomi Antar Berbagai Sektor

Hamid Yusuf dalam Hepiprayudi (2009a) mengemukakan bahwa penerapan *fair value* akan menguntungkan perekonomian Indonesia karena aset-aset perekonomian nasional yang selama ini disajikan menggunakan nilai buku dan disajikan jauh lebih rendah dari nilai sewajarnya akan digantikan dengan nilai yang menggambarkan nilai sebenarnya. Sebagai contoh sebelum tahun 1997, kebun sawit seluas satu hektar cukup dibangun dengan uang Rp.12 juta atau hanya Rp.6 juta sebelum tahun 1990-an, namun setelah tahun 1998 ketika kurs US \$ naik hingga tiga kali sehingga untuk itu dibutuhkan biaya sampai Rp.30 juta.

Awal implementasi akuntansi nilai wajar di Indonesia pada entitas di industri perbankan dan jasa keuangan mengakibatkan perubahan profitabilitas yang cenderung turun, namun bukan berarti kinerja perusahaan buruk karena kerugian tersebut tidak permanen. Signifikansi dampak dari penerapan akuntansi nilai wajar terhadap kondisi keuangan entitas bisnis setelah implementasi awal akan bergantung pada dual hal, yaitu: (1) jenis industrinya beserta komponen aset dan liabilitas yang dimiliki, dan (2) subyektifitas manajemen atas estimasi dan asumsi yang digunakan serta penilaian profesional auditor. Dampak penerapan akuntansi nilai wajar akan berbeda untuk industri

yang berbeda. Industri keuangan dan perbankan terkena dampak lebih signifikan dibandingkan industri lain karena umumnya sebagian besar aset dan liabilitas industri perbankan dan keuangan terdiri atas aset dan liabilitas keuangan yang sangat rentan terhadap perubahan nilai akibat perubahan pasar finansial yang sangat dinamis. Di Indonesia, penerapan akuntansi nilai wajar akan berdampak positif signifikan bagi industri yang asetnya *undervalued* seperti industri perkebunan. Signifikansi dampak penggunaan nilai wajar juga bergantung pada keahlian manajemen dan auditor dalam menentukan asumsi dan estimasi atas nilai wajar aset dan liabilitasnya, termasuk aset dan kewajiban keuangannya apakah untuk diperdagangkan, tersedia untuk dijual, dan ditahan hingga jatuh tempo. Diperlukan pertimbangan profesional yang baik untuk menilai aset dan liabilitas yang tidak aktif diperdagangkan. www.lockdmeyan.wordpress.com.

Secara umum, walaupun penggunaan nilai wajar dalam pelaporan keuangan masih kontroversial, namun dapat berdampak positif bagi kondisi ekonomi Indonesia karena pelaporan keuangan dapat lebih transparan dan relevan bagi pengguna mengingat nilai aset dan liabilitas disajikan dengan nilai yang sesungguhnya. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang dan kerjasama dengan berbagai pihak seperti badan penetapan standar, pebisnis, auditor, dan akademisi. www.lockdmeyan.wordpress.com.

Penerapan model nilai wajar akan lebih bermanfaat bagi dunia investasi, pasar modal, pemilik, kreditur, dan *stakeholder* lainnya, karena nilai wajar memberikan gambaran yang lebih realistis atas jumlah tercatat akun-akun dalam *Statement of Financial Position*, sehingga penerapannya secara konsisten di seluruh dunia patut untuk didukung. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi guna meningkatkan pemahaman mengenai penerapan model nilai wajar dan pengaturannya di dalam Standar Penilaian kepada pengguna jasa, penilai, regulator, dan *stakeholder* lainnya agar dapat diterapkan secara tepat dan konsisten. www.zeinyusufofficial.wordpress.com

PEMBAHASAN

Semua pengukuran mengandung kelemahan termasuk *historical cost* dan *fair value*, namun pemilihan pengukuran seharusnya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pengguna sesuai dengan era berdirinya perusahaan. Penggunaan akuntansi dengan nilai historis dan nilai kini sudah pernah diterapkan pada periode-periode lalu dan di masa depan seperti *trend* ini bukan tidak mungkin akan berulang seperti mode. Era politisasi akuntansi cenderung membuat pihak-pihak tertentu dapat mendominasi penentuan standar untuk kepentingannya. Sangat disayangkan jika alasan penentuan standar yang berterima umum adalah didasari oleh kesepakatan disalahgunakan untuk alasan praktek akuntan tukang jahit.

Banyaknya pihak yang pro dan kontra terhadap akuntansi nilai wajar seharusnya dimonitor terus menerus oleh badan pengatur standar untuk melihat keberterimaannya bagi pengguna laporan keuangan. Biaya dan usaha yang diperlukan untuk menerapkan nilai wajar sangat besar karena membutuhkan dukungan teknologi canggih dan sosialisasi luas kepada *stakeholders*. Manfaat nilai wajar dalam masa transisi ini belum terlalu jelas apalagi jika budaya perusahaan tidak mendukung untuk transparansi. Bagaimana mungkin perusahaan yang sudah menerapkan nilai wajar serta telah menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi internasional (*IFRS*) dapat langsung diminati investor asing seperti yang diharapkan, jika hal itu tidak menjadi keinginan prioritas dari para pemilik pendiri perusahaan. Penyusunan laporan keuangan sesuai *IFRS* seperti menjadi beban

tersendiri bagi sebagian besar perusahaan yang hanya go publik di suatu negara karena ada dorongan yang mewajibkannya dari badan pengatur (seperti Bapepam di Indonesia), sementara perusahaan go publik tersebut belum siap untuk go internasional.

Kondisi perekonomian yang tidak stabil, tingkat inflasi yang tinggi, dan meningkatnya pemahaman semantik investor atas nilai perusahaan, ditambah lagi dengan era komputerisasi yang makin canggih dan berkembang pesat, menjadi pendorong untuk pengalihan penilaian *historical cost* ke *fair value*. Setelah menerapkan nilai wajar, harapannya pengguna laporan keuangan dapat melihat realita ekonomi perusahaan dan mengambil keputusan dengan tepat. Jika keputusan yang diambil tepat maka harapannya dapat memperbaiki kondisi kinerja perusahaannya dan pada akhirnya diharapkan dapat memperbaiki perekonomian bangsa. Hal ini dapat terjadi jika hasil penerapan *fair value* berdampak *good news* ke masa depan, namun jika disinyalir menjadi *bad news* di masa depan, maka yang timbul adalah pesimisme dan dapat memperparah perekonomian bangsa. Pasti ada harga yang dibayar dari suatu realita yang terungkap karenanya *stakeholders* harus siap menghadapinya. Antisipasi terhadap pesimisme dari suatu realita ekonomi yang terungkap harus disosialisasikan seluas-luasnya agar para pengguna informasi keuangan tidak terkejut.

Di sisi lain, optimisme manajemen dan keahlian serta kreatifitas manajemen dapat mempengaruhi estimasi atas nilai wajar aset dan liabilitasnya. Jika hal ini tidak diawasi dengan baik oleh auditor yang independen maka yang terjadi adalah *mark-up*, yang dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan publik dan memperparah krisis multidimensi.

PENUTUP

Di tengah kondisi krisis perekonomian dunia, *International Accounting Standard Board (IASB)* sebagai badan penyusun *International Financial Reporting Standard (IFRS)* dengan dukungan berbagai pihak memutuskan untuk mengalihkan penilaian dari *historical cost* ke *fair value*. Hal ini dilakukan dengan harapan laporan keuangan dapat lebih mencerminkan realita ekonomi yang meningkatkan relevansinya untuk pembuatan keputusan pengguna. Dalam kondisi perekonomian yang tidak stabil *historical cost* kehilangan relevansi untuk pembuatan keputusan karena kondisi masa depan jauh berbeda dengan kondisi masa lalu. Pertanyaan mendasar yang perlu direnungkan semua pihak adalah apakah berbagai krisis yang terjadi akhir-akhir ini didesain oleh pihak-pihak tertentu atau terjadi secara tidak disengaja? Dimana peran penguasa dalam mengatur stabilitas perekonomian dunia?

DAFTAR RUJUKAN

- ACCA F7; (2011). *Financial Reporting (International and UK Stream) Study Text For Exams in 2012*; BPP Learning Media Ltd; London
- Anonymous; (2007). What is Fair Market Value (FMV)?; www.irs.gov
- Anonymous; (2010). Penerapan Akuntansi Nilai Wajar: Positif Atau Negatif?; www.lockedmeyan.wordpress.com
- Anonymous; (2010). Fair Value Accounting, Wajarkah Bagi Keuangan Perusahaan? www.zeinyusufofficial.wordpress.com
- Du, Ning; Linda Lin; John E McEnroe; (2010). Is The Truth The Problem?; The CPA Journal – Friday, January 1; www.allbusiness.com

- Godfrey, Jayne; Allan Hodgson, Ann Tarca, Jane Hamilton, Scott Holmes; (2010). Accounting Theory; 7 edition; John Wiley & Sons Australia, Ltd.
- Hepiprayudi; (2009a). Menuju IFRS: Rencana Penerapan Fair Value di Indonesia; <http://hepiprayudi.wordpress.com>.
- Hepiprayudi; (2009b). IFRS. What's That?; <http://hepiprayudi.wordpress.com>.
- Kartikahadi, Hans; Rosita Uli Sinaga; Merliyana Syamsul; Sylvia Veronica Siregar; (2012); Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS; Buku 1; Salemba Empat
- King, Alfred M; (2009). Determining Fair Value: The Very Essence of Valuation is The Professional Judgment of The Appraiser, Not Just A Set of Rules; Strategic Finance – Thursday, January 1; www.allbusiness.com
- Mirza, Ali Abbas dan Graham J. Holt; (2011). Practical Implementation Guide and Workbook for IFRS; Third Edition; John Wiley & Sons, Inc; Hoboken, New Jersey.
- Perner, Lars; (1999-2008). Introduction to Marketing; www.consumerpsychologist.com/marketing_introduction.html
- Siahaan, Hinsa; (2012). Implikasi dan Permasalahan dalam Mengimplementasikan Konsep Nilai Wajar dalam Kondisi Ekonomi Saat I; www.dnafirm.co.id
- Sonbay, Yolinda Yanti; (2010). Perbandingan Biaya Historis Dan Nilai Wajar; *Kajian Akuntansi*, Volume 2 No.1; Februari 2010, hal.1-8;
- Surbekti, Mhd. Dahlan; (2010). Berbagai Masalah Hukum Dalam Pelaksanaan Merger Bank di Indonesia; www.ejournal.umm.ac.id